

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM
PENGOLAHAN HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

(Skripsi)

Oleh
GILANG RAMADDHAN
NPM 2116021026



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PENGOLAHAN HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

GILANG RAMADDHAN

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang signifikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam aspek pengolahan ikan. Pemerintah telah berupaya melalui program pemberian bantuan fasilitas atau alat untuk pengolahan ikan, dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Perikanan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut masih menghadapi berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi program pemberdayaan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III. Teori ini memiliki 4 variabel yang dapat mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal dalam pelaksanaannya, karena disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain komunikasi yang belum efektif dalam pelaksanaan program dan keterbatasan anggaran. Selain itu, jumlah staf yang terbatas serta ketiadaan insentif bagi pelaksana program juga menjadi kendala dalam optimalisasi program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Program, Pemberdayaan Nelayan, Kabupaten Pesisir Barat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FISHERMAN'S EMPOWERMENT PROGRAM IN PROCESSING SEA FISH CATCHES IN PESISIR BARAT REGENCY

By

GILANG RAMADDHAN

Pesisir Barat Regency is one of the areas that has significant fisheries potential, both in terms of quality and quantity, which has not been optimally utilized, especially in the aspect of fish processing. The government has made efforts through a program to provide assistance in the form of facilities or tools for fish processing, with the aim of increasing the independence and welfare of the fishing community. This program is based on Law Number 7 of 2016 which is continued by the Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 10 of 2017 concerning Regional Fisheries Management. However, in its implementation, the program still faces various problems. This study aims to identify what factors cause the implementation of the empowerment program in processing marine fish catches to not run well. This study is based on the theory of the public policy implementation approach put forward by George Edward III. This theory has 4 variables that can measure the success of a program or policy. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of the Empowerment Program in Processing Marine Fish Catches in Pesisir Barat Regency has not been optimal in its implementation, due to various factors, including ineffective communication in program implementation and budget constraints. In addition, the limited number of staff and the lack of incentives for program implementers are also obstacles to optimizing the program.

Keywords: Program Implementation, Empowerment of Fishermen, Pesisir Barat Regency.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM
PENGOLAHAN HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Oleh

GILANG RAMADDHAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN DALAM PENGOLAHAN HASIL
TANGKAPAN IKAN LAUT DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Nama Mahasiswa : Gilang Ramaddhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116021026

Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryamah

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

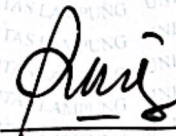
Ketua

: Darmawan Purba, S. IP, M. IP.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 April 2025
Yang Membuat Pernyataan



GILANG RAMADDHAN
NPM 2116021026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama GILANG RAMADDHAN, dilahirkan di Pasar Ulu pada tanggal 4 November 2003. Penulis merupakan putra kedua dari 5 bersaudara dari Ibu Fitri Yulisa dan Ayah Muzayin. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Muhammadiyah Krui tahun 2013,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 2 Pesisir Tengah pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Pesisir Tengah pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 Penulis dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik dalam mengasah skill diri Penulis. Penulis aktif berorganisasi yaitu menjadi Kasubbid *social media* di UKM-U PIK R RAYA Universitas Lampung tahun 2022. Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *batch 6* sebagai pelaksana program dan layanan masyarakat di Ruang Belajar Aqil Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan MSIB *batch 7* di Bank BTPN Syariah sebagai Fasilitator Pendamping di Provinsi Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan. Tidak akan pernah dimenangkan”

(Ir. Lies Hartono)

“Keberanian itu butuh dilatih, bukan datang secara tiba-tiba seperti wahyu Tuhan”

(Wiji Thukul)

“Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau.

Kita hidup atas apa yang kita impikan dan usahakan”

(Buya Hamka)

“Merendahkan sampai tidak ada seorangpun merendahkanmu. Mengalahkan sampai tidak ada seorangpun mengalahkanmu”

(Gilang Ramaddhan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya tulis ini,
Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibuku Tercinta

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Adik-adikku Tersayang

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Alamameterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sanwacana ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Pak Darma.

5. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Ibu.
6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, saran dan masukannya selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Muzayin dan Ibu Fitri Yulisa yang selalu memberikan dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang tiada hentinya, semoga kelak apa yang telah Ayah dan Ibu berikan akan menghantarkan Penulis menuju gerbang kesuksesan.

Bu, sampai saat dengan penulisan kalimat ini tidak ada kata yang tersemat dalam pikiran selain terima kasih semata. Anakmu ini yang tidak mengerti akan pola pikirmu terkadang menyakiti hatimu dengan sengaja. Akan tetapi engkau selalu membalasnya dengan lembut, menunjukkan apa yang benar dan seharusnya dilakukan. Maafkan anakmu ini yang sampai dengan skripsi ini diterbitkan belum pernah dapat membahagiakanmu. Akan tetapi, demi apapun aku berjuang.

Ayah, sampai sekarangpun diriku tidak mengerti bagaimana tentang perasaanmu kepada kami anak-anakmu. Layaknya seorang ayah, laki-laki tidak bercerita. Akan tetapi pernah muncul dalam benakku bahwa aku ingin berinteraksi lebih kepadamu. Aku ingin tahu bagaimana cara berpikirmu, bagaimana cara menangani situasi tertentu, apa kau lakukan pada saat seumuranku. Ayah memang tidak banyak bercerita, keinginanku untuk berbincang tidak sepenuhnya harus terjadi. Akan tetapi satu yang pasti, aku ingin menjadi seperti Ayah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan serta membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu. Ibu, Ayah. Jika benar kehidupan kedua itu benar adanya, aku ingin menjadi anakmu lagi dikemudian hari.

8. Kepada ketiga adik penulis, Fail Zaki, Zeza Kirani, Haura Kirana yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus memiliki alasan yang kuat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada adik-adik penulis untuk bersama-sama membanggakan kedua orang tua.
9. Kepada keluarga besar Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di bidang Keuangan, Ibu Eva, Mbak Rani, Abang Edin, Abang Junda, dan seluruh staf Humas Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih telah memberi dukungan materi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Informan penelitian, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dan para penerima program. Terima kasih telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat memperoleh informasi terkait substansi skripsi penulis.
11. Kepada sahabat penulis yang saat ini sedang memperjuangkan gelar yang sama, Raihan Azhari, Nurmayasari, Ropelia Santika, M Al Ardra Nur, Dominggus Aprian Yonandar, Tonang. Terima kasih telah mengisi waktu penulis sehingga penulis dapat terus melanjutkan proses skripsi ini hingga selesai. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
12. Kepada teman-teman pejuang MSIB *batch* 6 dan *batch* 7, Lena, Roy, Hanifa, Liza, Kurnia, Nilam, Agas, Ardes serta keluarga besar Ruang Belajar Aqil Kota Malang dan keluarga besar BTPN Syariah. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya yang sampai saat ini terus terjaga sehingga memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Kepada teman pejuang wisuda bulan Mei, Anisa, Isma, Nadira. Terima kasih karena telah mengingatkan penulis untuk terus konsisten dalam menyelesaikan skripsi penulis.

14. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta kebersamaan dalam suka duka selama perkuliahan.
15. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya Anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.
17. Untuk diri penulis sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat untuk terus konsisten menyelesaikan proses perkuliahan. Terima kasih Gilang, sudah sangat hebat dan mampu menyelesaikan proses demi proses perkuliahan ini. Mari berjuang lebih keras lagi dimasa depan.

Bandar Lampung, 17 April 2025

GILANG RAMADDHAN

NPM. 2116021026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, Karena atas berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat”. Penulisan proposal penelitian ini ditujukan untuk meraih gelar S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Selanjutnya penulis menyadari masih sangat amat banyak kesalahan dalam penulisan proposal ini. mulai dari pemilihan kata atau kalimat yang kurang tepat, format penulisan yang masih belum sesuai dengan standar Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung, bahkan sampai penyampaian poin-poin penting dalam tiap halaman yang mungkin nantinya akan jadi perbaikan penulis kedepannya untuk menyempurnakan penelitian ini, dan terakhir, penulis berharap penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat, almamater tercinta, dan juga penulis pribadi khususnya. Sekian terima kasih.

Bandar Lampung, 17 April 2025

GILANG RAMADDHAN

NPM. 2116021026

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Kebijakan Publik.....	15
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	17
2.2 Tinjauan Implementasi Kebijakan.....	19
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.2.2 Model-Model Kebijakan Publik.....	21
2.3 Tinjauan Tentang Program Dalam Pengolahan.....	27
2.3.1 Pengertian Program.....	27
2.3.2 Tujuan Program.....	28
2.3.3 Sasaran Target Program	28
2.4 Tinjauan Pemberdayaan	29
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan	29

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan.....	30
2.4.3 Tahap-tahap Pemberdayaan.....	32
2.5 Tinjauan Masyarakat Nelayan.....	33
2.6 Kerangka Berpikir	34
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Informan	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	46
3.8 Teknik Analisis Data	47
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	50
IV. GAMBARAN UMUM	51
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat.....	51
4.1.1 Sejarah Kabupaten Pesisir Barat.....	51
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pesisir Barat.....	53
4.1.3 Demografi Kabupaten Pesisir Barat.....	56
4.1.4 Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.....	58
4.2 Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat	60
4.2.1 Tugas dan Fungsi	60
4.1.2 Visi dan Misi.....	61
4.1.3 Program Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut....	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Hasil.....	67
5.1.1 Komunikasi	67
5.1.2 Sumber Daya.....	83
5.1.3 Disposisi.....	106

5.1.4 Struktur Birokrasi.....	117
5.2 Pembahasan	126
5.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Program ..	127
5.2.1.1 Komunikasi.....	127
5.2.1.2 Sumber Daya	129
5.2.1.3 Disposisi	132
5.2.1.4 Struktur Birokrasi	133
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	136
6.1 Kesimpulan.....	136
6.2 Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	142

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Nelayan Kabupaten Pesisir Barat	3
Tabel 2. Jarak Kabupaten Pesisir Barat ke Ibu Kota.....	4
Tabel 3. Data-Data Pendapatan Nelayan	5
Tabel 4. Target Sasaran Program Pemberdayaan tahun 2020-2023	7
Tabel 5. Daftar Perkembangan Pelaksanaan Program Pemberdayaan.....	8
Tabel 6. Sumber Informasi Data Primer	42
Tabel 7. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	55
Tabel 8. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tiap Kecamatan	56
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pesisir Barat	57
Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian ...	59
Tabel 11. Anggaran Program	90
Tabel 12. Anggaran Program dalam Perda Kabupaten Pesisir Barat.....	91
Tabel 13. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat	105
Tabel 14. Temuan Lapangan.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Hasil Produksi perikanan Kabupaten Pesisir Barat	2
Gambar 2. Kerangka Berpikir	36
Gambar 3. Peta Wilayah Administratif Pesisir Barat.....	55
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.....	61
Gambar 5. Perkembangan Realisasi Program Tahun 2020-2023	65
Gambar 6. Hasil Produksi Kelompok	66
Gambar 7. Dokumen Jumlah Pegawai di Bidang P2HP	86
Gambar 8. Lomba Masak Olahan Ikan Tingkat Provinsi Lampung	90
Gambar 9. Statistik Realisasi Pelaksanaan Program.....	92
Gambar 10. Informasi Terkait Program	95
Gambar 11. Berita Acara Penyerahan Fasilitas.....	102
Gambar 12. Fasilitas Program.....	104
Gambar 13. Dokumen Pengadaan CPNS dan PPPK	111
Gambar 14. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.....	114
Gambar 15. Prosedur Program.....	120
Gambar 16. Fragmentasi Program	123

DAFTAR SINGKATAN

DOB	: Daerah Otonomi Baru
P2HP	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Poklhasar	: Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
SOPs	: <i>Standar Operating Prosedures</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur

I. PENDAHULUAN

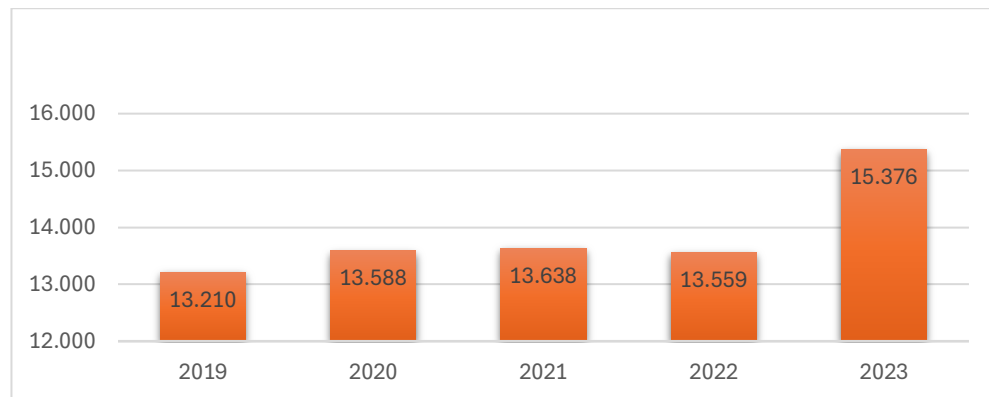
1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan yang luas dan berbagai pulau, sehingga dijuluki sebagai Negara Maritim dengan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai negara maritim, Indonesia termasuk salah satu penghasil perikanan terbesar di Asia Tenggara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam hasil perikanan. Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting Negara apabila dikelola secara baik, dan memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan. Sektor perikanan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai kabupaten dan kota, salah satunya di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat (2023), jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 171.247 jiwa. Sebagai daerah pesisir, sebagian besar masyarakat Kabupaten Pesisir Barat bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (2024), terdapat 2.397 nelayan yang aktif di wilayah tersebut. Kabupaten Pesisir Barat memiliki garis pantai sepanjang 210 kilometer yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dengan kondisi geografis tersebut, sektor perikanan menjadi salah satu potensi kekayaan alam utama di Kabupaten Pesisir Barat. Potensi perikanan yang ada di perairan Kabupaten Pesisir Barat menurut Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, (2024) terdiri dari berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, seperti

bluemarlin, tongkol, layur, tuna, tenggiri, cakalang, layang, simba, kakap merah, kakap putih, bawal, lamdang, kapas-kapas, dan berbagai jenis ikan laut lainnya. Produksi hasil tangkap perikanannya pun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut peneliti cantumkan hasil produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019-2023:

Gambar 1. Jumlah Hasil Produksi perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Barat



Sumber: (Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 2024)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi hasil produksi perikanan laut yang cukup besar dan selalu mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah hasil produksi perikanan di Pesisir Barat sebanyak 13.210 ton, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 13.588 ton, pada tahun 2021 13.638 ton, pada tahun 2022 13.559 ton dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai 15.376 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Pesisir Barat bukan sekedar unggul dalam kualitas saja, tetapi juga dari segi kuantitas.

Daerah Kabupaten Pesisir Barat dinilai memiliki potensi sumber daya perikanan yang dapat dijadikan andalan dalam pembangunan daerah dan bisa menyejahterakan masyarakatnya, potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat sangat besar, hal ini bisa dilihat dari potensi hasil produksi dan berbagai jenis ikan yang dimiliki. Akan tetapi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir

Barat, umumnya masih terjebak dalam kebiasaan menjual ikan segar tanpa melalui proses pengolahan, yang mengakibatkan nilai jual yang rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterbatasan fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dalam melakukan pengolahan ikan, karena mayoritas fasilitas, atau sarana yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Barat didominasi oleh alat penangkapan ikan saja. Berikut fasilitas atau sarana masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel. 1 Fasilitas, Sarana dan Prasarana Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Barat

No.	Nama/Jenis	Keterangan
1.	<i>Gill Net</i> (Jaring Rampus)	Alat Tangkap Ikan
2.	<i>Rawai</i> (Pancing Ulur)	Alat Tangkap Ikan
3.	<i>Mini Pursen</i> (Jaring Gelung)	Alat Tangkap Ikan
4.	Jukung/perahu	Sarana Penangkapan Ikan
5.	Rumpon	Alat Tangkap Ikan
6.	Dermaga Kuala Stabas	Sarana Transportasi
7.	Dermaga Pulau Pisang	Sarana Transportasi
8.	Balai Benih Ikan Ulok Manik	Sarana Budidaya Ikan

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Data tabel 1 menggambarkan bahwa fasilitas, sarana dan prasarana masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Barat di dominasi oleh alat tangkapan ikan, belum tersedia fasilitas atau sarana pendukung dalam pengolahan hasil tangkapan ikan, sehingga nelayan sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada, khususnya dalam menjalankan aktivitas pengolahan ikan. Kemudian, kendala dalam pemasaran hasil tangkap ikan juga merupakan penyebab kebiasaan nelayan di Kabupaten Pesisir Barat dalam menjual ikan hasil tangkapannya dengan keadaan mentah. Jarak yang jauh menuju pusat kota membuat proses pemasaran terbatas. Jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat secara geografis terletak di ujung provinsi.

Tabel 2. Jarak Kabupaten Pesisir Barat ke Ibu Kota

No	Jarak Ibu Kota Kabupaten		No.	Jarak Ibu Kota Provinsi	
	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota (Km)		Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak ke Ibu Kota Provinsi (Km)
1.	Lemong	54.00	1.	Lampung Barat	241.42
2.	Pesisir Utara	28.50	2.	Tanggamus	80.78
3.	Pulau Pisang	15.00	3.	Lampung Selatan	59.22
4.	Karya Pengawa	10.00	4.	Lampung Timur	80.24
5.	Way Krui	10.00	5.	Lampung Tengah	57.85
6.	Pesisir Tengah	1.00	6.	Lampung Utara	115.19
7.	Krui Selatan	8.50	7.	Waykanan	209.32
8.	Pesisir Selatan	25.00	8.	Tulang Bawang	119.36
9.	Ngambur	46.50	9.	Pesawaran	25.98
10.	Ngaras	64.20	10.	Pringsewu	41.40
11.	Bangkunat	64.00	11.	Mesuji	204.40
-	-	-	12.	Tulang Bawang Barat	139.60
-	-	-	13.	Pesisir Barat	231.00
-	-	-	14.	Bandar Lampung	0.00
-	-	-	15.	Metro	51.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018 & 2024

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki jarak yang cukup jauh, baik menuju pusat ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi, untuk mencapai ibu kota provinsi, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat harus menempuh jarak sejauh 231,00 km. Jarak yang jauh ke kota jelas menghambat nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, mereka harus

mengeluarkan biaya tambahan untuk pendistribusian ikan. Akibatnya, nelayan cenderung menjual hasil tangkapannya dalam kondisi mentah kepada tengkulak tanpa proses pengolahan.

Situasi ini berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan, terutama ketika hasil tangkapan melimpah namun harga pasar mengalami penurunan. Potensi sumber daya perikanan yang ada seharusnya bisa memberikan dampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat setempat khususnya nelayan, karena sumber daya alam yang melimpah seharusnya menghasilkan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi mereka. Kurangnya pengetahuan dan fasilitas, atau sarana yang dimiliki oleh nelayan dalam melaksanakan aktivitas pengolahan ikan, mempengaruhi antusiasme dan produktivitas nelayan dalam melakukan kegiatan pengolahan, hal ini bisa mempengaruhi pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, padahal apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan akses teknologi yang memadai, maka sumber daya perikanan yang ada akan secara optimal memberikan dampak terhadap masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan.

Tabel 3. Data-Data Pendapatan Nelayan

No.	Cara Penangkapan	Hasil Tangkapan	Harga Jual Normal/Kg	Harga Jual Penurunan/Kg
1.	Pukat	Ikan, Kepting, Udang	25.000-80.000	12.000-55.000
2.	Pancing	Semua Jenis Ikan	20.000-65.000	10.000-35.000
3.	Jaring	Ikan, Kepiting, Udang	20.000-73.000	10.000-55.000

Sumber : Web Resmi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat

Pendapatan masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Barat bersifat tidak menentu karena bergantung pada musim. Nelayan dapat memperoleh penghasilan lebih besar apabila harga pasar stabil dan kondisi laut mendukung.

Namun, pada saat musim ikan melimpah, harga jual ikan cenderung menurun akibat banyaknya jenis ikan yang tersedia dan tingginya persaingan di pasar. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat nelayan. Apabila persoalan ini tidak diatasi dengan tepat, maka akan berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pemberdayaan merupakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Proses pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan salah satu komponen dari empat fungsi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang ini telah dibagi menjadi empat fungsi pemerintahan, yaitu pemberdayaan (*empowering*), pembangunan (*development*), pengaturan (*regulation*), dan pelayanan publik (*public service*). Sementara itu, menurut Dessy Tuasamu, (2019) dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan penerapan teknologi, karena pada dasarnya, pemberdayaan adalah proses perubahan sosial yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam demi meningkatkan kesejahteraan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam proses pemberdayaan, sesuai dengan fungsinya, terutama dalam menyediakan sarana

dan prasarana, termasuk teknologi yang mendukung pemberdayaan, khususnya dalam kegiatan pengolahan ikan.

Pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, menyadari adanya tantangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang belum maksimal, terutama dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah melakukan upaya pemberdayaan, salah satunya adalah melalui program bantuan dalam pengolahan ikan, adanya program ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Perikanan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Program Pemberdayaan dalam Pengolahan Hasil Perikanan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat, mencakup pemberian fasilitas penunjang dan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Pesisir Barat, fasilitas tersebut seperti mesin atau alat pengolahan ikan beserta perlengkapannya, *culler cool box* beserta perlengkapannya, serta mesin pemecah es. Sasaran/target dari program ini adalah kelompok masyarakat nelayan, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pesisir Barat atau yang disebut dengan Poklahsar. Berikut target/sasaran kelompok penerima Program bantuan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2023:

Tabel 4. Target/sasaran Program Pemberdayaan tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok
1.	Lemong	6
2.	Karya Pengawa	13
3.	Pesisir Utara	14
4.	Way Krui	10
5.	Pesisir Tengah	46
6.	Krui Selatan	12
7.	Pesisir Selatan	30

8.	Ngambur	2
9.	Ngaras	3
10.	Bengkunat	9
11.	Pulau Pisang	3
Jumlah		148

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (2024)

Program ini telah dimulai sejak tahun 2020, dengan tercatat sebanyak 148 kelompok yang berpartisipasi dalam program ini di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun program ini telah berjalan selama beberapa tahun, pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari data Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan program, dimana target penyaluran bantuan kepada target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan belum tercapai. Dari total 148 kelompok yang menjadi target sasaran program, hanya 45 kelompok yang berhasil menerima bantuan sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Berikut adalah perkembangan dari pelaksanaan program bantuan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2023:

Tabel 5. Daftar Perkembangan Pelaksanaan Program Pemberdayaan tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Pesisir Tengah	46	3	2	2	10
2.	Way Krui	10	1	1	0	0
3.	Karya Pengawa	13	1	1	0	2
4.	Krui Selatan	12	0	2	0	3
5.	Pesisir Selatan	30	0	1	2	4
6.	Pesisir Utara	14	1	1	1	2
7.	Bengkunat	9	1	0	1	1
8.	Lemong	6	1	0	0	0
9.	Ngambur	2	0	0	0	0

10. Ngaras	3	0	0	0	0
11. Pulau Pisang	3	0	0	0	1
Total	148	8	8	6	23
Total Realisasi	148	45			

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (2024)

Tabel 5 menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, realisasi penyaluran bantuan program dalam sektor pengolahan perikanan telah mencapai 45 kelompok, yang setara dengan 30,41% dari target 148 kelompok yang ditetapkan untuk periode 2020-2023. Sementara itu, dari tahun 2020 sampai 2023 jumlah bantuan yang telah tersalurkan kepada kelompok sasaran penerima yakni sebanyak 250 bantuan, yang terdiri dari 9 paket mesin atau alat pengolahan ikan beserta perlengkapannya, kemudian sebanyak 6 unit mesin pemecah es dan sebanyak 298 paket *culler box*. Tabel 2 ini juga menunjukkan jumlah realisasi penerima program ini, Kecamatan Pesisir Tengah terlihat sebagai kecamatan dengan jumlah penerima bantuan terbanyak. Di sisi lain, masih ada beberapa kelompok di kecamatan lain, seperti Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Ngambur, yang belum mendapatkan bantuan dari program ini.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024 terdapat pernyataan dari Alex Senandar, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, menyatakan bahwa Program Pemberian Bantuan untuk pengolahan perikanan telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Terdapat kelompok-kelompok yang telah menerima program ini. Namun, Berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 15 November 2024 terhadap penerima program khususnya yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah, bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan alat pengolahan ikan yang disediakan oleh Pemerintah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat nelayan mengenai program dan penggunaan bantuan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan hanya berlangsung pada awal pemberian bantuan saja, tanpa adanya tindak lanjut yang diberikan kepada

penerima program. Seperti yang di sampaikan oleh Dewi Andriana selaku penerima bantuan program, bahwa program ini bagus dan sangat membantu, namun dalam pelaksanaannya masih kurang baik, karena pemerintah belum secara menyeluruh memberikan penjelasan terkait program terutama mengenai mekanisme penggunaan bantuan alat yang diberikan. Senada dengan hal tersebut, Andi Madasa selaku penerima bantuan program juga mengatakan bahwa hanya ada penyampaian informasi terkait program bantuan saja, namun untuk mekanisme penggunaan bantuan dan hal-hal lainnya belum ada.

Program Pemberdayaan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut ini, merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berwenang sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharno (2013:5) yang menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah respon dari suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap isu-isu masyarakat." Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan pemerintah untuk menangani masalah yang bersifat publik. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diinginkan. Peneliti tertarik untuk mengkaji program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut, terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan dengan pemahaman bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya yang menyangkut prosedur dan bantuan yang merupakan hak masyarakat nelayan, sangat penting untuk dilakukan demi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Guna mendukung penelitian ini, penulis mengumpulkan kajian terkait penelitian terdahulu yang telah diselesaikan dan dianggap penting untuk dijadikan referensi dan juga sumber rujukan peneliti dalam menyelesaikan tugas penelitian ini. Berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini perlu didukung dengan *review* dari penelitian-penelitian terdahulu

yang merupakan penelitian sejenis. Untuk itu, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan penelitian sejenis.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh La Madjid, (2020) dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Bagula Kota Ambon. Berdasarkan penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa belum optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah terkait 4 indikator-indikator yang menjadi fokus penelitian yakni peningkatan sumber daya, pengembangan kelompok, penyediaan informasi dan pengembangan usaha produk terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir dengan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tony Pathony, Yusman Yuhana, Iwan Henri Kusnadi., (2020) yang berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas program pemberdayaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum Efektif, hal ini dilihat dari kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya program pemberdayaan nelayan serta masih terdapat nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya, belum semua nelayan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Fitri Dewi, Frans Simon Dadiara., (2022) dengan judul Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Implementasi Pemberdayaan meliputi tiga aspek yaitu, bina manusia, bina usaha, dan bina kelembagaan, proses pemberdayaannya belum optimal karena beberapa kendala seperti kurangnya

kesadaran kelompok nelayan, karakteristik nusantara, dan jaringan komunikasi yang belum memadai.

Penelitian keempat ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aidyl, Fitri Eriyanti,. (2022) yang berjudul Efektivitas Pemberian Bantuan *Fishbox* Oleh Dinas Perikanan Kota Pariaman Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya pemberian bantuan *fishbox* masih belum efektif karena indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, belum mencapai target awal dengan pelaksanaan pemberian bantuan *fishbox*. Indikator yang kedua yaitu integrasi, dalam pelaksanaan pemberian bantuan *fishbox* tersebut Dinas Perikanan Kota Pariaman melakukan komunikasi dengan bentuk sosialisasi terhadap kelompok nelayan. Indikator ketiga yaitu adaptasi, pelaksanaan pemberian bantuan *fishbox* tersebut, Dinas Perikanan Kota Pariaman belum bisa menyesuaikan diri dengan anggota kelompok Nelayan di kota Pariaman.

Penelitian kelima ialah penelitian yang dilakukan oleh Etin Indrayani, (2021) yang berjudul Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyuksekannya. Selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai.

Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda, lalu perbedaan selanjutnya yaitu topik penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, dan perbedaan lainnya terdapat pada subjek dan objek penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti mengenai:

“Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat Tidak Terlaksana dengan Optimal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat tidak berjalan dengan optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kecil dalam menambah sumber kepustakaan dari berbagai pihak dan pengalaman bagi peneliti dengan merealisasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan seperti implementasi kebijakan publik dalam pembahasan permasalahan implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat.

1.4.2 Secara Praktis

- a Pemerintah : Memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan program secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.
- b Masyarakat : Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat tentang pelaksanaan program pemberdayaan

nelayan dalam pengolahan ikan di Kabupaten Pesisir Barat.

- c Akademis : Menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya terkait tema implementasi program pemberdayaan nelayan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Islamy dalam Sulistio (2012:3) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Eyestone dalam Winarno (2012:19) mengemukakan bahwa kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai interaksi antara suatu unit pemerintahan dan lingkungan sekitarnya. Konsep yang diajukan oleh Eyestone ini memiliki makna yang sangat luas dan kurang spesifik, karena kebijakan publik dapat mencakup berbagai aspek yang berbeda. Beberapa pakar lain juga memberikan pandangannya mengenai kebijakan publik, sehingga terdapat beragam definisi mengenai hal ini. Friedrich dalam Winarno (2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang mungkin ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sementara, Anderson dalam

Winarno (2012:19) merumuskan kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, Anderson dalam Abidin (2012:22-23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan publik bersifat pendorong dan berorientasi pada tujuan, bukan perilaku acak atau kebetulan. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas. Ini berarti bahwa pembuatan kebijakan tidak boleh dilakukan sembarangan atau hanya karena ada kesempatan. Tanpa tujuan yang jelas, keberadaan kebijakan tidak diperlukan.
2. Kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan atau tindakan yang terpisah. Artinya, suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lainnya, melainkan saling terkait dan berfokus pada pelaksanaan, interpretasi, serta penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar pernyataan atau niat yang diungkapkan oleh mereka.
4. Kebijakan publik dapat bersifat negatif, yaitu melarang, atau positif, yaitu mendorong pelaksanaan atau anjuran tertentu.
5. Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan memiliki sifat yang mengikat. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki otoritas untuk memaksa masyarakat agar mematuhi.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh para aktor yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu untuk menangani masalah yang ada di suatu negara. Dengan demikian, dari tindakan para aktor tersebut, dihasilkan keputusan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:25) tahap-tahap kebijakan publik meliputi:

1. Penyusunan Agenda

Menurut Dunn yang dikutip oleh Winarno (2012:30), penyusunan agenda melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang akan menentukan masalah-masalah yang akan dimasukkan ke dalam agenda publik. Sebelum masalah-masalah tersebut ditetapkan, mereka akan bersaing satu sama lain, sehingga hanya beberapa yang akan terpilih untuk menjadi bagian dari agenda kebijakan para perumus kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda ini, terdapat masalah yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali, masalah yang menjadi fokus utama, serta masalah yang akan ditunda penanganannya karena berbagai alasan.

Isu kebijakan dapat diangkat menjadi agenda kebijakan jika memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana diungkapkan oleh Wahab dalam Sulistio (2012:15), sebagai berikut:

- a. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang
 - b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularistik tertentu (mendapat perhatian masyarakat luas secara khusus) dan berdampak dramatis. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang amat luas
 - c. Isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas
 - d. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat
 - e. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).
- #### 2. Formulasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31), tahap formulasi kebijakan

merupakan proses di mana masalah yang telah teridentifikasi dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini, upaya dilakukan untuk mencari berbagai cara penyelesaian masalah tersebut. Solusi yang diusulkan berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Pemilihan alternatif-alternatif ini sejalan dengan penetapan masalah yang telah ditentukan sebagai agenda publik, di mana beberapa alternatif bersaing dipertimbangkan untuk diambil sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31), tahap adopsi kebijakan merujuk pada proses di mana alternatif yang diusulkan telah dianalisis untuk menentukan keunggulannya dibandingkan dengan berbagai pilihan lain yang mungkin ada. Perbandingan nilai-nilai yang dianalisis mencakup aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, keadilan, dan lain-lain, baik yang terkait dengan masukan, keluaran, maupun hasil akhir.

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31-32), tahap implementasi kebijakan merupakan langkah krusial. Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi sekadar dokumen dan arsip yang terorganisir dengan baik jika tidak ada pelaksanaan yang nyata. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan oleh lembaga-lembaga administrasi dan agen-agen pemerintah hingga ke tingkat bawah, agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan efektif dan tidak sia-sia.

5. Evaluasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:192) menyatakan bahwa proses evaluasi kebijakan diperlukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil yang diharapkan. Sering kali, kebijakan publik mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang diinginkan.

2.2 Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:134), pelaksanaan kebijakan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Sebuah program kebijakan perlu dilaksanakan agar dapat mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai tahap dalam proses kebijakan yang terjadi setelah pengesahan undang-undang. Dalam pengertian yang lebih luas, pelaksanaan mencakup penerapan undang-undang di mana berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan atau program-program tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan juga merupakan fenomena yang rumit yang dapat dipahami sebagai suatu proses, hasil (*output*), maupun sebagai dampak (*outcome*).

Sedangkan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:135-136), implementasi kebijakan dapat dibatasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup upaya untuk mengonversi keputusan-keputusan menjadi langkah-langkah operasional dalam jangka waktu tertentu, serta melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, yang ditetapkan oleh kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan rekomendasi diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi hanya akan berlangsung setelah undang-undang disahkan dan anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Mazmanian & Paul Sabatier dalam Wahab (2004:68), selaras menjelaskan bahwa, implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Keputusan

tersebut umumnya mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menetapkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai metode untuk menyusun dan mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui serangkaian tahapan tertentu, yang biasanya dimulai dengan pengesahan undang-undang. Selanjutnya, *output* kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi terkait, serta kesediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dampak yang dihasilkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak, akan terlihat dari *output* tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut dipersepsikan oleh lembaga yang mengambil keputusan. Akhirnya, akan ada upaya perbaikan yang signifikan terhadap undang-undang atau peraturan yang relevan. Secara lebih spesifik, Mazmanian & Sabatier menekankan bahwa fokus utama dalam implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program mulai berlaku, termasuk kejadian dan aktivitas yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijakan, yang mencakup usaha administrasi serta upaya untuk menciptakan dampak nyata di masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep tentang implementasi kebijakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari suatu proses kebijakan yang sangat krusial, yang mana biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dari berbagai aktor. Sehingga tercapailah suatu kebijakan yang memberikan hasil yang praktis terhadap masyarakat di suatu wilayah atau negara dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

2.2.2 Model-Model Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2020:150) beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh ahli adalah:

1. Model George C. Edwards III

Edward III menyebut model pelaksanaan kebijakan publiknya sebagai Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi. Edward memandang pelaksanaan kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Edwards dalam Agustino (2020:150), beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

a) Komunikasi

Menurut George Edward C Edward III Dalam Agustino (2020:154), Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sehingga Edward menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi. Indikator tersebut antara lain :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*streetlevel-bureauacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran

tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b) Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu elemen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, kurangnya sumber daya pada pihak pelaksana dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan menurut Edward dalam Agustino (2020:155) meliputi:

1. Staf

Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

2. Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia/staf, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada

masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Implementator* harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

4. Wewenang

Wewenang pada umumnya harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para *implementor* di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

5. Fasilitas

Fasilitas adalah elemen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. *Implementor* mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Edward dalam Agustino (2020:157) jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

1. Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*)

Dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

3. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya menurut Edward dalam Agustino (2020:158), yaitu:

1. *Standard Operating Procedures (SOPs)*

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator /birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan).

2. Melaksanakan Fragmentasi

Adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan suatu abstraksi atau representasi dari pelaksanaan kebijakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang optimal, yang terjadi dalam interaksi berbagai variabel. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) model ini menjelaskan bahwa kinerja

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil dan pada setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud kan. Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, maka tidak akan bisa terjadi multi-interprestasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2012:176) selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencangkup sumber daya manusia, dan dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) di dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) dalam suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Kondisi Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter Van Horn Suharno (2013:177) Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi *Implementor*

Persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan berbagai macam model-model implementasi kebijakan, penelitian ini akan berfokus pada model Geogre C. Edwar III dikarenakan kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

2.3 Tinjauan Tentang Program Dalam Pengolahan

2.3.1 Pengertian Program

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada

pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996). Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu program tersebut adalah program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat berupa pemberian bantuan fasilitas untuk pengolahan ikan dan pembinaan. Program ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2017.

2.3.2 Tujuan Program

Adapun tujuan dari program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat adalah untuk membantu masyarakat nelayan agar dapat berdaya dan bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan terutama dalam pengolahan hasil perikanan, menjadi produk yang bernilai jual tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil menengah (UKM) di wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

2.3.3 Sasaran/Target Program

Definisi sasaran menurut Komarudin (1990) dalam bukunya Manajemen Berdasarkan Sasaran, yaitu: target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti. Sedangkan menurut Winardi dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Modern (1992) mendefinisikan target sebagai berikut : Target adalah sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran/target dari program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat ini adalah kelompok masyarakat nelayan terutama pelaku usaha dalam pengolahan hasil perikanan.

2.4 Tinjauan Pemberdayaan

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ambar Teguh (2004; hlm 77) mendeskripsikan bahwa pemberdayaan Secara etimologi berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari penjelasan tersebut, maka pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk dapat memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide pertamanya pemberdayaan sangat bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan banyak dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang dilakukan, terlepas dari keinginan serta minat mereka. Menurut Mardikanto dkk. (2013:28), istilah pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengendalikan lingkungan mereka demi memenuhi keinginan, termasuk akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas sosial. Winarni dalam Suryana juga mengungkapkan bahwa Pemberdayaan memiliki tiga aspek utama, yaitu pengembangan (*enabling*), penguatan daya (*empowering*), dan pencapaian kemandirian. Pemberdayaan merujuk pada peningkatan kapasitas individu, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang beruntung, agar mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

3. Terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah di paparkan, maka pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu inisiatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui berbagai program atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan, mengembangkan pengetahuan, serta memperkuat kemampuan atau potensi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, guna membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:80) menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan komunitas menjadi lebih mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan memanfaatkan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan internal masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hidup, menciptakan lapangan kerja, serta kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Selain itu, Theresia dan rekan-rekannya (2015:153) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan mencakup berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelembagaan
Upaya yang dilakukan dalam kegiatan atau tindakan akan berkontribusi pada peningkatan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha.
2. Peningkatan usaha
Peningkatan dalam pendidikan (motivasi belajar), aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis yang dijalankan.
3. Peningkatan pendapatan
Dengan adanya peningkatan dalam usaha yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, baik untuk individu maupun untuk masyarakat.
4. Peningkatan lingkungan
Peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial, mengingat kerusakan lingkungan sering kali dipicu oleh kemiskinan atau pendapatan yang rendah.
5. Peningkatan kualitas hidup
Dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungan, diharapkan kualitas hidup setiap keluarga dan masyarakat akan mengalami perbaikan.
6. Peningkatan masyarakat
Kondisi kehidupan yang lebih baik, didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus pemberdayaan adalah pada masyarakat marginal yang umumnya memiliki keterbatasan dalam berusaha dan akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga sering kali tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain yang lebih berpotensi.

2.4.3 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo (2007;2-7) strategi pemberdayaan melewati tiga tahapan, yaitu meliputi:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri. Pada tahap ini nelayan yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar nelayan ini mendapat cukup informasi. Melalui sosialisasi (pengenalan), maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau pihak lainnya.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap ini disebut juga sebagai *capacity building* atau memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Tujuan dari tahap ini adalah memampukan nelayan, sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang yang diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *lifeskill* para nelayan.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, para nelayan diberikan pelatihan untuk membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya, daya untuk melakukan analisis terhadap masalahnya, mencari penyelesaian masalah yang dihadapi atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh

dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan evaluasi diri (*selfevolution*) terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Pemberian pelatihan ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.5 Tinjauan Masyarakat Nelayan

Menurut Sastrawidjaya (2002) mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Secara geografis, masyarakat nelayan menurut Kusnadi, (2003) adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya, yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan melaksanakan aktivitas berkaitan dengan penghidupan yang bersumber dari sumber daya laut atau perikanan. Menurut Hadi (2000:73), terdapat beberapa karakteristik yang mencirikan masyarakat nelayan, antara lain: (1) kondisi sosial ekonomi yang rendah, (2) tingkat pendidikan yang minim, (3) kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, (4) keberadaan hunian liar (*squatters*) dan kawasan kumuh (*slum*). Sementara itu, Menurut Sastrawidjaya, (2002) menjelaskan ciri-ciri masyarakat nelayan dari berbagai segi, antara lain:

1. Dari segi cara hidup.

Komunitas nelayan adalah komunitas gotong-royong. Kebutuhan gotong-royong dan tolong-menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

2. Dari segi keterampilan.

Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka

bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua.

3. Dari bangunan struktur sosial.

komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan adalah individu yang tinggal di kawasan pesisir dan bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Masyarakat nelayan memiliki ciri atau karakteristik unik yang membedakan mereka dari komunitas lain, yang terbentuk akibat kehidupan di laut yang penuh tantangan dan risiko, terutama yang disebabkan oleh faktor alam.

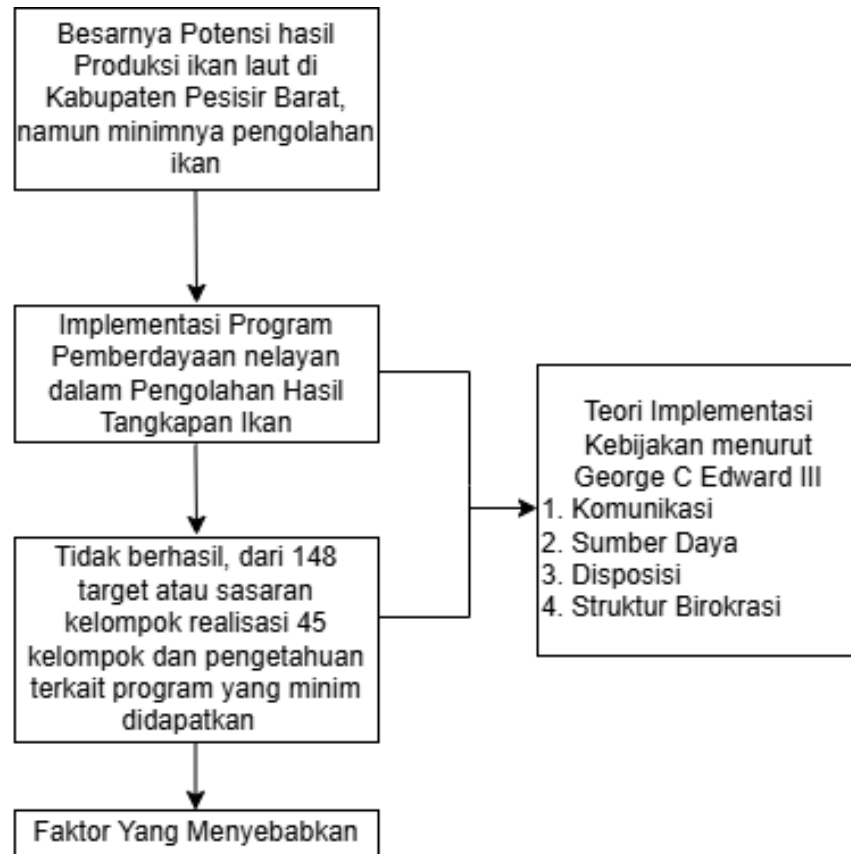
2.6 Kerangka Berpikir

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Pesisir Barat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, namun belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam pengolahan ikan, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pendapatan nelayan, terutama ketika hasil tangkapan melimpah namun harga pasar mengalami penurunan.

Pemerintah selanjutnya membuat suatu program yang mana dapat memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat nelayan ke depannya. Program Pemerintah ini dirancang atas dasar melihat belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Pesisir Barat terutama dalam pengolahan ikan yang mana disebabkan oleh minimnya fasilitas penunjang yang dimiliki masyarakat nelayan dan berdampak terhadap kesejahteraan. Program pemberdayaan dalam pengolahan hasil tangkap ikan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Perikanan

Daerah. Namun pada pelaksanaannya program ini masih menuai persoalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan program, dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4), Struktur Birokrasi.

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber : (Diolah oleh Peneliti, 2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menurut Moelong (2018:14) adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan temuan-temuan serta data-data yang berkaitan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sradley dalam Sugiyono (2020) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait

dari situasi sosial. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) mengembangkan pemahaman lebih lanjut dengan menetapkan kriteria dalam penentuan fokus penelitian. Menurut mereka, fokus penelitian harus memenuhi aspek kesesuaian dengan tujuan penelitian, ketersediaan data dan sumber daya, kemungkinan untuk diteliti, serta signifikansi teoretis dan praktis. Kriteria ini membantu peneliti dalam memastikan bahwa fokus yang dipilih dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada model Implementasi kebijakan atau program menurut George C. Edward III pada Agustino (2020:154), indikator-indikator model tersebut adalah:

1. Komunikasi

- a. Transmisi

Penelitian menganalisis proses penyaluran komunikasi dari pembuat program kepada pelaksana Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat. Aspek yang dikaji meliputi mekanisme penyampaian informasi, jalur komunikasi yang digunakan, dan proses transmisi program dari pusat hingga ke level pelaksana.

- b. Kejelasan

Peneliti berfokus pada tingkat pemahaman pelaksana program terhadap isi program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan. Analisis mencakup kejelasan petunjuk pelaksanaan program, prosedur pemberian, dan standar operasional yang harus dijalankan.

- c. Konsistensi

Terkait keseragaman informasi yang diterima oleh pelaksana program dan masyarakat. Peneliti menganalisis konsistensi pesan terkait informasi program yang disampaikan. Termasuk terhadap konsistensi dalam standar pemberian bantuan dan prosedur yang diterapkan pada program.

2. Sumber Daya

a. Staf

Menganalisis aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program Pemberdayaan dalam pengolahan ikan ini. Analisis mencakup kecukupan jumlah petugas pelaksana, kompetensi pelaksana program, dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugas.

b. Anggaran

Menganalisis ketersediaan anggaran yang ada dan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program. Hal ini mencakup kecukupan anggaran dan mekanisme pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program.

c. Informasi

Peneliti mendalami ketersediaan dan kelengkapan data serta petunjuk teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Analisis mencakup pemahaman pelaksana terhadap prosedur program pemberdayaan, kejelasan informasi tentang mekanisme pelaksanaan program, dan bagaimana informasi dikelola untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

d. Kewenangan

Aspek wewenang menjadi fokus penelitian dalam mengkaji kejelasan dan ketepatan pendelegasian kewenangan kepada petugas pelaksana program pemberdayaan. Penelitian menganalisis bagaimana struktur kewenangan diatur, proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program, dan batasan-batasan wewenang yang diberikan kepada petugas pelaksana program.

e. Fasilitas

Menganalisis aspek ketersediaan fasilitas yang di berikan dan mekanisme pendistribusian kepada penerima program. Aspek yang dianalisis terkait kecukupan jumlah fasilitas, yang di distribusikan serta mekanisme pendistribusian fasilitas kepada penerima Program.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi program, bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Pengaturan Birokrasi

Edward III menyatakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu melakukan Pengaturan Birokrasi. Dalam konteks program ini, konsep tersebut relevan karena keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh pengaturan sumber daya manusia (SDM) di dalam birokrasi, termasuk kapasitas, kompetensi, dan ketersediaan staf.

c. Insentif

Insentif yang dikemukakan oleh Edward III sangat relevan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pelaksana. Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik untuk mengatasi tantangan implementasi kebijakan adalah manipulasi insentif, yang bertujuan untuk mendorong para pelaksana kebijakan agar tetap termotivasi dan berorientasi pada keberhasilan program.

4. Struktur Birokrasi

a. *Standard Operating Prosedur* (SOPs) dalam menjalankan kebijakan program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Fragmentasi Penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat.

Dari keempat indikator implementasi kebijakan yang digunakan, apabila indikator pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak berjalan atau tingkat berjalannya di bawah 50 % dari keempat indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program

Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlaksana.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/situs dimana di dalamnya terdapat permasalahan/potensi atau fenomena yang akan dianalisa (Nasution, 2023). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip dalam Moleong (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan mencakup dokumen dan sumber lainnya. Sumber data dapat berupa objek, peristiwa, individu, atau lokasi yang dijadikan acuan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diterima oleh peneliti sebagai orang pertama dari hasil observasi dan wawancara dengan informan secara langsung. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dan Masyarakat Penerima Program.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui media lain seperti jurnal, dokumen, maupun media-media cetak koran, ataupun *website-website* yang memberitakan seputar fenomena terkait Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat.

3.5 Informan

Pada penelitian kualitatif informan sangat penting dikarenakan sebagai sumber utama dalam memperoleh data yang akan dikembangkan dalam penelitian. (Moleong, 2014) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, dan keadaan lokasi penelitian pada kenyataannya. Informan yang ditentukan dalam penelitian kualitatif ini dengan menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian (*purposive sampling*). Alasan peneliti menggunakan *purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil merupakan keterwakilan (*representative*) bagi peneliti, karena peneliti meyakini bahwa informan yang terpilih adalah aktor yang memiliki pengetahuan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 6. Sumber Informasi Data Primer

No.	Nama	Jabatan
1.	Yenti Misnoni	Penerima Program
2.	Dewi Andriana	Penerima Program
3.	Ngatno	Penerima Program
4.	Arsita Nitami	Penerima Program
5.	Eka Novita Sari	Penerima Program
6.	Gunawan	Penerima Program
7.	Rismawati	Penerima Program
8.	Amirudin, S.E., M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
9.	Alex Senandar, S.St. Pi., M.M.	Kabid P2HP Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat

10. Tuti Desi Lestari, A.Md.	Staf P2HP Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
------------------------------	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dari responden, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara dan sumber. Menurut Sugiyono (2018:224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.6.1 Metode Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono, (2019:226) Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar-dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan observasi *non-partisipatif* (*nonparticipatory observation*), yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. Peneliti pun sebelumnya sudah melakukan pra-riset, dengan demikian peneliti menggunakan observasi sistematis atau observasi berkerangka (*structured observation*) adalah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian. Objek yang di observasi mencakup penyebaran dan ketersediaan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat

nelayan penerima program, ketersediaan staf dan kesesuaian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program.

3.6.2 Metode Wawancara

Wawancara mendalam merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan informan terkait topik penelitian (Sugiyono, 2011). Proses ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai isu yang sedang diteliti. Wawancara mendalam ini dilakukan melalui interaksi langsung atau tatap muka dengan informan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi umum berkisar antara masalah dan tujuan penelitian terkait implementasi program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat. Berikut hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti:

1. Pada tanggal 25 Oktober 2024 Peneliti mewawancarai Pak Alex Senandar, S.St.Pi., M.M., Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 08.43 WIB.
2. Pada tanggal 15 November 2024 Peneliti mewawancarai Ibu Dewi Andriana dan Pak Gunawan selaku penerima program pada pukul 10.44 WIB.
3. Pada tanggal 13 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Pak Alex Senandar, S.St.Pi.,M.M., Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 10.14 WIB.
4. Pada tanggal 16 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Tuti Desi Lestari, A.Md. Staf Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir

Barat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 10.05 WIB.

5. Pada tanggal 21 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Pak Amirudin, S.E.,M.M., Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 11.08 WIB.
6. Pada tanggal 22 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Dewi Andriana selaku penerima program pada pukul 10.12 WIB.
7. Pada tanggal 22 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Yenti Misnoni selaku penerima program pada pukul 11.43 WIB.
8. Pada tanggal 22 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Arista Nitami selaku penerima program pada pukul 12.48 WIB.
9. Pada tanggal 22 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Eka Novita Sari selaku penerima program pada pukul 13. 46 WIB.
10. Pada tanggal 22 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Ngatno selaku penerima program pada pukul 15.08 WIB.
11. Pada tanggal 23 Januari 2025 Peneliti mewawancarai Ibu Risma Wati selaku penerima program pada pukul 11.23 WIB.

3.6.3 Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2019:240). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016. Laporan Pelaksanaan Program 2020-2023, Data Demografi Kabupaten Pesisir Barat, Data staf Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data penelitian, peneliti perlu melakukan pemeriksaan dan validasi ulang terhadap data yang diperoleh dari lapangan, khususnya dari hasil wawancara, agar tetap konsisten dengan fokus dan tujuan penelitian. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dan kualitas yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah ditentukan. Menurut Lutfy Hariwibowo (2021: 42-43), proses pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah mempersiapkan wawancara dengan menyusun panduan atau kuesioner yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Setelah data terkumpul, peneliti akan melaksanakan proses verifikasi dan triangulasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Data yang telah divalidasi kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tahapan-tahapan ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini, yaitu:

3.7.1 Editing Data

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses *editing* ini, keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi kemudian di edit menjadi hasil penelitian.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Pada penelitian ini, interpretasi data dilakukan peneliti dengan menyajikan aspek yang diperlukan dalam bentuk-bentuk point-point penting sebagai temuan dalam penelitian.

3.7.3 Sistematisasi Data

Melakukan penyusunan hasil wawancara dan data-data pendukung berupa foto, dokumen, tabel dan sebagainya secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengorganisasian data secara sistematis dan rasional sebagai respon terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017: 193). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246),

analisis data kualitatif dilakukan melalui kegiatan interaktif yang berlanjut hingga selesai, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam proses pengolahan data. Penelitian ini mengacu pada panduan analisis data dari Miles dan Huberman. Proses analisis ini telah dimulai sejak tahap pengumpulan data dan berlanjut hingga data tersebut dianalisis. Model analisis ini bertujuan untuk mendapatkan data yang paling kredibel. Apabila selama proses analisis hasil wawancara tidak memuaskan, peneliti akan mengulang pertanyaan hingga mendapatkan data yang saturasi (Sugiyono, 2019: 321). Berikut adalah tahapan pelaksanaannya:

3.8.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, dan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan reduksi data dengan cara menyusun data yang diperoleh dari lokasi penelitian ke dalam laporan yang lengkap dan terperinci mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat. Laporan tersebut kemudian dirangkum, dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian ini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang

terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk dilakukannya suatu kesimpulan.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif mencakup temuan-temuan yang bersifat orisinal dan belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa penjelasan deskriptif mengenai objek yang sebelumnya dianggap tidak jelas, analisis hubungan sebab-akibat, interaksi, serta pengembangan teori. Tahap verifikasi menjadi bagian akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti meninjau data yang telah diperoleh dan menganalisisnya dengan menerapkan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yang berupa data mentah, yang kemudian ditulis ulang dalam kategori yang sesuai. Setelah melalui proses reduksi dan penyesuaian dengan fokus penelitian, data tersebut dianalisis, diperiksa keabsahannya, dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa bahan kajian yang digunakan mencerminkan variabel yang ingin diteliti. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Menurut Miles,. dkk (2014), triangulasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah bentuk triangulasi yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk menguji kredibilitas informasi. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti wawancara, observasi lapangan, atau dokumentasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah bentuk triangulasi yang dilakukan dengan memeriksa kembali data yang diperoleh dari sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui observasi lapangan dapat diperkuat dengan wawancara terhadap informan yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah strategi yang digunakan untuk menguji keandalan data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keandalan dan validitas data dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi seiring waktu atau dalam konteks yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 231, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5364). Pada dasarnya pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperhatikan aspirasi masyarakat Pesisir Barat yang dituangkan dalam beberapa surat regulasi antara lain:

- a. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat Nomor : 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15/DPRD-LB/Kep,D/2007 tanggal 23 Maret 2007

tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;

- d. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/KPTS/01/2010, tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- e. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/198/ KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- f. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/199/KPTS/01/2010 tanggal, 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- g. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/BaKPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- i. Keputusan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang persetujuan pembentukan dan pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- j. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat dan;
- k. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pertimbangan aspirasi-aspirasi tersebut, Pesisir Barat Lampung kini telah resmi menjadi Kabupaten Pesisir Barat dengan Krui sebagai ibukotanya. Sejak diresmikannya daerah otonomi baru (DOB) dan pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat oleh pemerintah pusat pada 22 April 2013, wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari sebelas kecamatan.

Sebagai daerah otonomi baru, Pesisir Barat memiliki struktur masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal, dengan 16 marga Sai Batin, sehingga dikenal sebagai negeri Sai Batin dan para ulama. Masyarakat di Pesisir Barat mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama mata pencaharian. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sumber daya laut dengan menangkap berbagai jenis ikan bernilai tinggi, seperti kerapu dan kakap merah, yang menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Dengan demikian, Pesisir Barat berhasil mempertahankan keberlangsungan ekonominya setelah pemisahan dari kabupaten induk. Kabupaten ini juga kaya akan sumber daya alam, menjadikannya salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Provinsi Lampung, terutama di sektor pariwisata yang menjadi ciri khas Pesisir Barat.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang berada di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat :4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104°, 50', 0" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.993,80 \text{ Km}^2$ (data berdasarkan Kepmendagri Nomor 050- 135 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021) atau 11,21% dari luas wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (daratan dan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km (berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesai, 2017).

Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung :

- a Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.



Gambar 3. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pesisir barat
Sumber: Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bangkunat dengan luas 943,70 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km².

Tabel 7. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Pekon	Jumlah Kelurahan
1.	Pesisir Selatan	409,17	16	-
2.	Bangkunat	943,7	14	-
3.	Ngambur	327,17	9	-
4.	Pesisir Tengah	120,64	5	2
5.	Karya Pengawa	211,11	11	-
6.	Way Krui	40,92	10	-
7.	Krui Selatan	36,25	10	-

8.	Pesisir Utara	84,27	12	-
9.	Lemong	454,97	13	-
10.	Pulau Pisang	64	6	-
11.	Ngaras	215,03	11	-
	Total	210 km	116	2

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017

4.1.3 Demografi Kabupaten Pesisir Barat

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat di setiap Kecamatan memiliki jumlah penduduk yang bervariasi, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan (Ribuan) Tiap Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lemong	6780	6094	12874
Pesisir Utara	4417	4046	8463
Pulau Pisang	828	726	1554
Karya Pengawa	8118	7533	15651
Way Krui	4546	4229	8775
Pesisir Tengah	10179	9608	19787
Krui Selatan	5475	5108	10583
Pesisir Selatan	13702	12082	26504
Ngambur	11292	10517	21809
Ngaras	5030	4520	9550
Bangkunat	14350	12797	27147
Pesisir Barat	84717	77980	162069

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, 2020)

Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak yaitu kecamatan Bangkunt dengan 27.147 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Pulau Pisang dengan 1.554 jiwa. Kecamatan dengan penduduk laki-laki terbanyak yaitu kecamatan Bangkunt dengan 14.350 jiwa, kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak yaitu kecamatan Bangkunt dengan 12.797 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk laki-laki paling sedikit yaitu kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah 828 jiwa, dan penduduk perempuan paling sedikit yaitu kecamatan Pulau Pisang dengan 726 jiwa.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
SD	22.122	21.942	27,20
SLTP	13.136	12.160	15,61
SLTA	14.638	11.353	16,04
D1/Sederajat	-	-	-
D2/Sederajat	269	389	0,41
D3/Sederajat	336	589	0,57
Strata 1 (S1)	1.576	1.754	2,06
Strata 2 (S2)	97	50	0,09
Strata 3 (S3)	5	4	0,01
Tidak Lulus	9.273	8.321	10,86
SD			
Belum Sekolah	22.875	21.124	27,15
Jumlah	84.327	77.686	100

Sumber : (Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2025)

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian besar penduduk, yaitu 27,20%, merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), diikuti oleh 15,61% lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 16,04% lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sementara itu, hanya 2,06% yang memiliki gelar Strata I (S1), 0,57% berpendidikan D3 atau sederajat, 0% untuk D1 atau sederajat, dan 0,41% untuk D2 atau sederajat. Selain itu, terdapat 10,86% penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SD. Dominasi pendidikan pada jenjang SD hingga SMA menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori yang memerlukan pemberdayaan. Tingginya angka penduduk yang tidak lulus SD dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kondisi ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

4.1.4 Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat masih memerlukan perhatian dan pengembangan yang lebih lanjut. Dari total populasi, terdapat 75.697 individu yang berada dalam rentang usia angkatan kerja, yaitu antara 13 hingga 56 tahun. Di sektor pertanian dan perkebunan, jumlah penduduk yang terlibat mencapai 35.416 jiwa, sedangkan di sektor peternakan hanya 17 jiwa. Sektor perdagangan melibatkan 498 jiwa, sektor perikanan atau nelayan sebanyak 956 jiwa, dan karyawan di sektor swasta, BUMN, BUMD, serta honorer berjumlah 3.146 jiwa. Selain itu, terdapat 3.662 jiwa yang bekerja sebagai buruh di perkebunan dan pertanian, 346 jiwa sebagai pedagang kecil, 807 jiwa sebagai buruh harian lepas, 161 jiwa di sektor perikanan dan peternakan, serta 3 jiwa di sektor industri. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 2.062 jiwa, TNI dan POLRI sebanyak 81 jiwa, dan kategori lain-lain mencapai 13.196 jiwa. Sisa populasi belum terlibat dalam dunia kerja. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Pesisir Barat memiliki karakteristik agraris, di mana

mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan meliputi padi, damar, durian, duku, sayuran, dan lain-lain. Selain itu, sebagai daerah pesisir, sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Barat umumnya memulai aktivitas mereka pada waktu subuh, dengan keberangkatan sekitar pukul 04.00 WIB dan kembali pada pukul 09.00 WIB. Oleh karena itu, pemukiman nelayan cenderung sepi pada siang menjelang sore, karena para nelayan beristirahat di rumah. Namun, ada kalanya beberapa nelayan tetap berada di perahu mereka untuk memeriksa kondisi perahu atau mengisi bahan bakar. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan bervariasi, mulai dari ikan-ikan dengan nilai jual tinggi seperti *bluemarlin*, kakap merah, dan kerapu, hingga ikan-ikan kecil yang juga memiliki nilai jual. Sementara itu, sebagian besar istri nelayan menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Hanya sedikit dari mereka yang bekerja di pasar atau sebagai penjual ikan. Ketika hasil tangkapan melimpah, biasanya para istri nelayan akan mengolah ikan tersebut menjadi ikan asin dengan metode penggaraman yang sederhana. Keterbatasan sarana, prasarana, dan fasilitas membuat proses pengolahan ikan dilakukan secara tradisional dan terbatas, yang berdampak terhadap rendahnya harga jual ikan saat musim tangkap ikan tiba.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis dan Jumlah Mata Pencarian Pokok Tahun 2020

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani Perkebunan	25024	10392
2.	Peternak	9	8
3.	Perdagangan	321	177
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1044	1018

5.	Nelayan	948	8
6.	Karyawan Swasta, BUMN, BUMD, honorar	1765	1381
7.	Buruh Harian Lepas	704	103
8.	Buruh perkebunan & pertanian	2567	1095
9.	Buruh Perikanan & Peternakan	149	12
10.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	12	0
11.	POLRI	80	1
12.	Industri	3	0
13.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	175	55
14.	Pedagang	208	138
15.	Lain-lain	10527	2669

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2025)

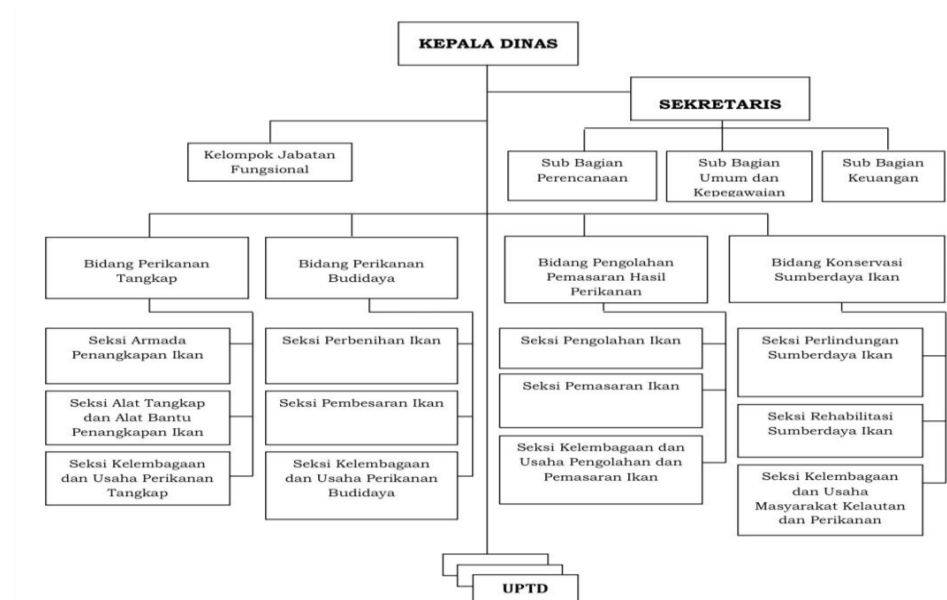
4.2 Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat

4.2.1 Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pesisir Barat, tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Perikanan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a Perumusan kebijakan teknis di sektor Perikanan;
- b Pelaksanaan administrasi dan pembangunan di sektor Perikanan;
- c Pengorganisasian, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi pembangunan sektor Perikanan;
- d Pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan sektor Perikanan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
(Sumber: Portal resmi Kabupaten Pesisir Barat, 2025)

4.2.2 Visi dan Misi

1. Visi dan Misi Dinas Perikanan

Mengacu pada visi Kabupaten Pesisir Barat yaitu “Pesisir Barat Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa maka Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki merumuskan visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Nelayan Yang Sejahtera, Mandiri, Tangguh dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa:

1. Sejahtera

Meningkatnya taraf hidup masyarakat Pesisir Barat yang mampu memanfaatkan sumber daya masyarakat Nelayan

2. Mandiri

- a Dinas Perikanan yang mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif berbasis teknologi.
- b Mampu mengatasi masalah yang terus berkembang serta mengubah tantangan menjadi peluang.

3. Tangguh

- a Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pembudidaya, nelayan, pedagang, pengolah skala kecil dan menengah.
- b Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis.
- c Terpenuhinya konsumsi ikan masyarakat

4. Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi dan rehabilitasi sumber daya Ikan serta Terumbu Karang.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka di jabarkan dalam misi Dinas Perikanan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM
- 2) Mempermudah akses permodalan
- 3) Memfasilitasi sarana/prasarana Masyarakat Nelayan
- 4) Menjaga Kelestarian ekosistem sumber daya laut dan ikan.

2. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan, maka strategi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat adalah:

- a Meningkatkan kemandirian masyarakat nelayan dan strategi yang diambil adalah:
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi masyarakat nelayan
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumber daya laut
- b Meningkatkan kualitas *stakholder* perikanan dan kelautan, strategi yang di ambil adalah:
 - 1) Peningkatan profesionalisme aparat
 - 2) Pengembangan organisasi, sarana dan prasarana serta kinerja aparat
 - 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir
 - 4) Pengembangan dan Kaji terap teknologi
 - 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan informasi pembangunan yang merata
- c Meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, strategi yang di ambil adalah:
 - 1) Meningkatkan usaha konservasi dan rehabilitasi Sumber daya perikanan dan kelautan
 - 2) Eksplorasi potensi laut yang berwawasan lingkungan
 - 3) Pengembangan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam pengawasan SDA
 - 4) Pengembangan dan sosialisasi produk hukum Dinas Perikanan
- d Mengembangkan usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan, strategi yang diambil adalah:
 - 1) Peningkatan kelembagaan bidang perikanan
 - 2) Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang

- 3) Pengembangan produk pasca panen baik tradisional maupun Modern
- 4) Pengembangan pasar dan peningkatan daya saing produk hasil laut
- 5) Promosi dan pengembangan pasar produksi hasil laut.

4.2.3 Program Dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut

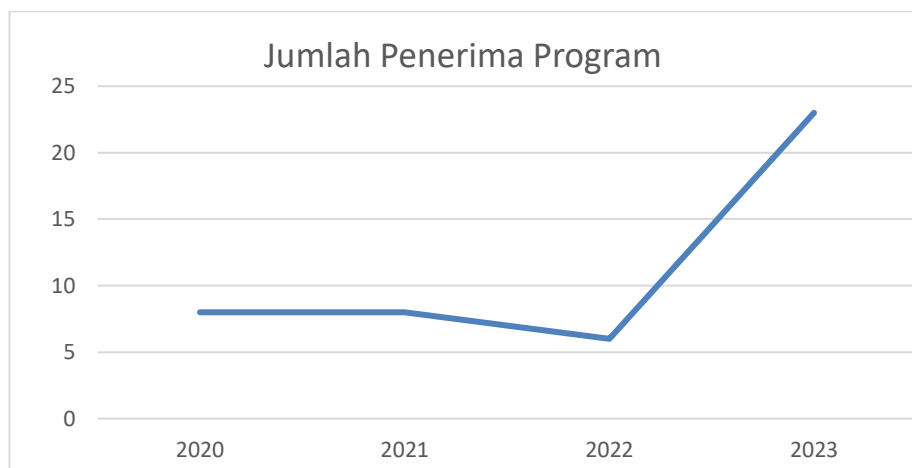
1. Definisi & Tujuan Program

Program Dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Perikanan Daerah turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, berupa pemberian bantuan fasilitas/sarana untuk pengolahan ikan antara lain; yakni seperti mesin atau alat pengolahan ikan beserta perlengkapannya, *cooler box*, dan mesin pemecah es serta pembinaan.

Program Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dalam pengolahan hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sasaran/Target Program

Sasaran/target dari program bantuan fasilitas/sarana pengolahan hasil perikanan ini adalah kelompok masyarakat nelayan terutama pelaku usaha pengolahan hasil perikanan atau yang disebut dengan Poklamsar, yang mana dalam satu kelompok terdapat 10 sampai 25 orang anggota, tercatat 148 kelompok yang menjadi bagian dari target/sasaran program, berikut realisasi perkembangan pelaksanaan program:



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Program Tahun 2020-2023

Sumber : Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 5 di atas, terlihat dengan jelas perkembangan atau realisasi pelaksanaan program ini, dari total 148 kelompok, sebanyak 45 kelompok telah menerima program, yakni pada tahun 2020 terdapat 8 kelompok, tahun 2021 juga 8 kelompok, tahun 2022 sebanyak 6 kelompok, dan pada tahun 2023 ada sebanyak 23 kelompok yang menerima program.

3. Hasil Produksi Kelompok

Hasil produksi dari program ini berupa berbagai jenis olahan ikan, seperti bakso ikan, abon ikan, siomay, empek-empek ikan, nuget, batagor, ikan panggang, *baby fish krispi*, berikut hasil produksi rata-rata setiap tahunnya:

Jumlah Kelompok P2HP		Jenis Kegiatan			
Pengolahan	Pemasar	Pengolahan	Produksi	Pemasar	Produksi
1 TB (JTB)	1 JB (JTB)	Bakso Ikan	8.56 Ton/Tahun	Panggang Ikan	1.78 Ton/Tahun
		Ikan Panggang	1.78 Ton/Tahun		
		Abon Ikan	0.96 Ton/Tahun		
		Siomay	0.71 Ton/Tahun		
		Empek-empek Ikan	1.860 Ton/Tahun		
		Nuget	0.16 Ton		
		Batagor	0.54 Ton		
		Baby Fish Krispi	0.6 Ton		

ANGKA KONSUMSI IKAN (AKI) DI KABUPATEN PESANGIR BARAT
(TAHUN 2021 - 2023)

Gambar 6. Hasil Produksi Kelompok
Sumber : (Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 2025)

Berdasarkan Gambar 6 di atas memperlihatkan bahwasanya hasil produksi setiap olahan (pertahun) dari keseluruhan kelompok berbeda-beda, yakni bakso ikan sebesar 8,56 ton/tahun, abon ikan 0,96 ton/tahun, siomay 0,71 ton/tahun, empek-empek ikan 1.860 ton/tahun, nuget 0,16 ton/tahun, batagor 0,54 ton/tahun, ikan panggang 1,78 ton/tahun, *baby fish krispi* 0,6 ton/tahun.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlaksana dengan baik, karena ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III, dari empat indikator keberhasilan implementasi yang digunakan, maka seluruh indikator, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu program ini belum mampu memberdayakan masyarakat nelayan secara maksimal di Kabupaten Pesisir Barat, karena kurangnya pembinaan dari pihak pemerintah kepada penerima program, sehingga menyebabkan tujuan utama dari pelaksanaan program tersebut tidak tercapai dengan optimal.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Program Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlaksana dengan optimal, antara lain yakni komunikasi yang kurang efektif dalam pelaksanaan program, keterbatasan anggaran, terutama pada periode 2020 sampai 2022 akibat kebijakan relokasi atau *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pesisir Barat, jumlah staf yang masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan, ketiadaan

insentif atau penghargaan bagi pelaksana program, serta tidak terlaksananya pembinaan pada *Standard Operating Prosedures* (SOPs) dari pihak Pemerintah.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti terkait Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu memperbaiki komunikasi dalam pelaksanaan program, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan secara langsung di setiap desa atau kelurahan, agar informasi terkait program pemberdayaan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu mengelola realisasi anggaran pelaksanaan program secara optimal, termasuk mengantisipasi potensi perubahan kebijakan nasional seperti *refocusing* anggaran, agar pelaksanaan program tidak terganggu. Selain itu, dinas juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kapasitas staf pelaksana program, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen, agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan insentif kepada para pelaksana program guna meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.
3. Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat perlu melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pendampingan yang intensif serta berkelanjutan kepada masyarakat nelayan, agar mereka benar-benar mampu mandiri dalam mengelola dan mengembangkan hasil tangkapan ikan laut khususnya dalam pengolahan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik..Sinar Grafika. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik, Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Aidyl, M., & Eriyanti, F. (2022). Efektivitas pemberian bantuan fishbox oleh Dinas Perikanan Kota Pariaman dalam rangka pemberdayaan nelayan. *Tuas*
- Ambar,T.S. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dessy Tuasamu, F. (2019). ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU. In Jurnal Academia Praja (Vol. 2).
- Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 7(1), 82-100. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2417>.
- DP Kabupaten Pesisir Barat (2023). Laporan Tahunan Program Bantuan Bagi Kelompok Pengolahan. Pesisir Barat.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A., & Anna, S. (2002). Penilaian Depresiasi Sumber daya Perikanan Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan. *Jurnal Pesisir Dan Lautan*, 4(2), 36–49.
- Hadi, Sudharto P .(2000). Manusia dan lingkungan. Semarang : Badan

penerbit Universitas Diponegoro.

- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*
- Indrayani, E. (2021). *Evaluasi program bidang pemberdayaan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Pemekasan Provinsi Jawa Timur.*
- Jones, Charles., (1960). *Pengantar Kebijakan Publik.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komaruddin. (1990). *Manajemen Berdasarkan Sasaran.* BumiAksara, Jakarta.
- Kusnadi. (2003). *Membela Nelayan.* Yogyakarta: GRAHA ILMU
- La Madjid. (2020). *Implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Bagula Kota Ambon.*
- Malik, H., & Saribulan, N. (2019). *Implementasi Kebijakan Usaha Perikanan Melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.* Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 1(2), 115-135.
- Mallawi, M. N., & Akbar, A. (2023). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Takalar pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.* Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1(4), 221-237.
- Mansur, J. (2021). *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.* Jurnal Ekonomi Islam, VI(II), 324–334.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung. Alfabeta
- Maria, W. N., dkk. (2023). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak.* Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P), 8(2), 210-224.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- Moelong, J Lexy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosa karya. Bandung.

- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nawawi, Ismail. 2014. *Public Policy: Analisis. Strategi Advokasi Teori Dan Praktik*. ITS Press. Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2013. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media. Jakarta.
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i1.914>
- Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.
- Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Perikanan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Permana, C. H. A., & Purnomo, D. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Analisis dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), xx-xx.

- Sastrawidjaya. 2002. Nelayan Nusantara. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelutan dan Perikanan. Jakarta.
- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama
- Sulistio, Eko Budi. 2012. Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy): Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004). Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Suriadi, G., dkk. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pemerintah pada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Desa Bondalem. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11(2), 595-606.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Syarifudin.
- Titaley, S., dkk. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat bagi Kelompok Nelayan dalam Pengembangan Desa Pesisir (Studi Kasus: Desa Larike). METIKS, 3(2), 79-86.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- Winardi, (1992). Pengantar Ilmu Ekonomi, Tarsito, Bandung.
- Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Wrihatnolo, Tahap Pemberdayaan, Penyadaran, Pengkapasitasan Masyarakat Nelayan. Graha Media (2007:2-7).
- Zakariya, A. F. (2020). Pemberdayaan Nelayan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan di Desa Karangagung. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal, 2(2), 133-150.